

# KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)

## (Studi Pembangunan Desa Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh)

Setiya Atirah<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>

[setiyaatirah@gmail.com](mailto:setiyaatirah@gmail.com)<sup>1</sup>, [azhar.mnur@ar-raniry.ac.id](mailto:azhar.mnur@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### ABSTRAK

Konsepsi pemimpin dan kepemimpinan selalu menarik di bicarakan, hal ini dapat di fahami dan sering menjadi perbincangan berbagai aspek masyarakat, dalam sebuah kepemimpinan tentu menarik di perbincangkan pula tentang arah setiap rencana pembangunan. Lebih jauh tolak ukur keberhasilan sebuah kepemimpinan adalah dilihat dari seberapa pesat dan tercapainya sebuah pembangunan yang di rencanakan setiap aparatur kepemimpinan atau aparatur pemerintah. Pernyataan bahwa penyelenggaraan siyasah syariyyah harus sesuai dengan apa-apa yang bermaktab secara tersurat dalam syara saja meskipun merupakan kebutuhan fundamental, namun nyatannya tidak realistis. Hal ini tidak sepenuhnya terbukti dalam perkembangan pelaksanaan siyasah syari'iyah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam banyak kasus pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah lebih banyak bersandar atau sesuai dengan dalil-dalil syara yang berbeda dengan waktu dan pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah yang pertama kali. Dari latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka timbul Rumusan masalah sebagai berikut: Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Tinjauan Siyasah Syari'iyah Terhadap Sikap Jujur Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan, (2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Syari'iyah Terhadap Sikap Kurang Tegas Kepala Desa, (3) Bagaimana Tinjauan Siayasah Syari'iyah Terhadap pembangunan sarana dan prasarana. Jenis dalam penelitian penulisan menggunakan Penelitian Kualitatif yang menggunakan bentuk lokasi penelitian. Judul telah menggambarkan suatu isu yang spesifik yang membedakan permasalahan penelitian yang telah atau sedang dilakukan oleh peneliti yang lain. Dan pada intinya materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut. Penelitian ini bersumber dari data primer seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data sekunder di peroleh dari studi Pustaka berupa Alqur'an, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, pendapat para ulama, dokumen dan buku serta karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang dapat disimpulkan terkait kebijakan kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana: Dalam proses mengambil kebijakan terkadang masih sering kurang tegas, sehingga timbul permasalahan dari sisi ketidak tegasaan dalam mengambil kebijakan. Terakhir Dalam hal ini kepala desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan kurang cerdas bagi masyarakat dikarenakan lebih cenderung cerdas terhadap kepentingan pribadi dan golongan tertentu, akhirnya lagi-lagi masyarakat yang di kesampingkan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. Juga sarana dan prasarana di gampong yang kurang memada dan tergolong kurang bersih.

**Kata Kunci:** Siyasah Syari'iyah, Kebijakan Pembangunan, Kepemimpinan Kepala Desa.

### PENDAHULUAN

Konsepsi pemimpin dan kepemimpinan selalu menarik di bicarakan, hal ini dapat di fahami dan sering menjadi perbincangan berbagai aspek masyarakat, dalam sebuah kepemimpinan tentu menarik di perbincangkan pula tentang arah setiap rencana pembangunan. Lebih jauh tolak ukur keberhasilan sebuah kepemimpinan adalah dilihat dari seberapa pesat dan tercapainya sebuah pembangunan yang di rencanakan setiap aparatur kepemimpinan atau aparatur pemerintahan. Tentunya setiap rencana pembangunan harus

ada beberapa kebijakan yang di ambil oleh setiap para pemimpin. Kebijakan ini menjadi titik gerak sebuah pengambilan keputusan yang selanjutnya di eksekusi menjadi sebuah pengaplikasian di setiap tataran kepemimpinan.

Dalam pembangunan desa ada dua aspek elemen dasar yang perlu di perhatikan yaitu<sup>1</sup> elemen masyarakat dan pemerintah. Kepala desa wajib memotifasi dan memberi semangat dan dorongan setiap masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari yang di nyatakan dalam perilaku. Pembangunan adalah sebuah proses dimana masyarakat yang di padukan dan di persatukan dalam wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, social, kebudayaan dan masyarakat, di dorong penuh dalam setiap kemajuan nasional. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak cara seperti ini sering di gunakan dalam sebuah pemerintahan. Secara umum pengambilan kebijakan atau keputusan ialah sebuah hasil dari segala bentuk masalah yang dimana melalui proses musyawarah di dalamnya, jawaban dari sebuah pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan sebuah pemilih dari salah satu alternatif dari alternatif yang di tawarkan dan pernah ada, serta pengakhiran dari sebuah pemikiran tentang sebuah masalah atau problema yang di hadapi.

Pengambilan keputusan yang di lakukan kepala desa sebagai pemimpin masyarakatnya akan berpengaruh besar dalam pemerintahannya, oleh karena itu hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan sikap bawahannya. Dan selanjutnya kepala desa harus mampu mempunyai alternatif-alternatif lainnya dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan yang tepat sehingga tujuan pemerintahan yang di embannya serta dapat meningkatkan kinerja bawahan dapat tercapai secara optimal dan maksimal. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku. Kebijakan adalah arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Adapun Kebijakan menurut para ahli yaitu:

- Kebijakan menurut Friedrich (1969) dalam Agustino yaitu kebijakan serangkaian tindakan atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- Kebijakan menurut Anderson (1984) dalam Agustino yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.<sup>2</sup>
- Kebijakan menurut William Dun (1999) yaitu Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (law) dan peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan

---

<sup>1</sup> Kartasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO, 2001. h.50

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jatim: Setara Press, 2015),h.347

intepretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

- Kebijakan menurut Marbun (2007) ditulis dalam kamus politik yaitu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Adapun pembangunan “desa yang memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan yang ada di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbarui dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Salah satunya dengan penentuan karakter masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan pengembangan kemampuan sumber daya manusiannya sendiri. Dengan adanya kegiatan yang produktif yang akan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat Pembangunan sarana dan prasarana untuk saat ini seharusnya sudah lebih baik dibandingkan waktu dulu. Sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat desa yang memiliki keterampilan dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Ini semua adalah dampak dari beberapa program yang terus melakukan kaderisasi dibidang pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti program P3DT, PPK, dan PNPM mandiri pedesaan. Ada tujuh tentang kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana desa.

Pembangunan sarana dan prasarana untuk saat ini seharusnya sudah lebih baik dibandingkan waktu dulu. Sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat desa yang memiliki keterampilan dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Ini semua adalah dampak dari beberapa program yang terus melakukan kaderisasi dibidang pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti program P3DT, PPK, dan PNPM mandiri pedesaan. Ada tujuh tentang kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana desa. Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al- Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemberian. Al -Qur'an hanya menaktubkan tata nilai. Demikian pula As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan seperti rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat dalam hal ini, dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah syari'iyah, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Pernyataan bahwa penyelenggaraan siyasah syariyyah harus sesuai dengan apa-apa yang bermaktub secara tersurat dalam syara saja meskipun merupakan kebutuhan fundamental, namun nyatanya tidak realistis. Hal ini tidak sepenuhnya terbukti dalam perkembangan pelaksanaan siyasah syari'iyah itu sendiri. Khulafa al- Rasyidin, sebagai contoh sering membuat kebijakan yang berbeda dengan dalil-dalil syara yang bersifat juz'iyah dan tersurat secara munthuq. Oleh karena itu, dalam banyak kasus pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah lebih banyak bersandar atau sesuai dengan dalil-dalil syara yang berbeda dengan waktu dan pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah yang pertama kali. Dengan

---

<sup>3</sup> H.A. Djazuli *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group 2003), h.2

kata lain maka universalitas nilai siyasah syari'iyah terbuhul manakala ia mampu melepaskan diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama ia mampu menyantuni beban dan tuntutan yang muncul lantaran perbedaan tempat dan waktu.<sup>4</sup>

Dengan melihat adanya permasalahan- permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perspektif siyasah syari'iyah” (Studi Pembangunan Desa Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh).

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena untuk memahami fenomena seputar tentang Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Siyasah Syar'iyah, dengan pendekatan deskriptif (dalam bentuk kata-kata). Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menemukan pola, hipotesis, dan teori yang mendasari Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Siyasah Syar'iyah, Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan langsung dari Keuchik, Aparatur Gampong dan Masyarakat. maka secara purposive dapat ditentukan obyek penelitian ini yaitu Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perspektif Siyasah Syar'iyah. Dan yang menjadi subjeknya adalah Bapak Keuchik, 2 orang aparatur gampong dan 3 orang masyarakat gampong. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi di Gampong terkait dengan Kebijakan kepala desa dalam membangun sarana dan prasarana. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti kebijakan kepala desa atau catatan kegiatan keagamaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Faktor Pendorong dalam pelaksanaan pembangunan Desa Peunyeurat adalah Kerjasama antar sesama aparat sangat optimal, Sikap positif masyarakat dalam berpartisipasi, Pelayanan Publik, Kualitas Sumber Daya, pembangunan dalam bidang kesehatan, pembangunan dalam pendidikan, dan Dana. Dalam proses mengambil kebijakan terkadang masih sering kurang tegas, sehingga timbul permasalahan dari sisi ketidaktegasan dalam mengambil kebijakan. Terakhir Dalam hal ini kepala desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan kurang cerdas bagi masyarakat dikarenakan lebih cenderung cerdas terhadap kepentingan pribadi dan golongan tertentu, akhirnya lagi-lagi masyarakat yang di kesampingkan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. Juga sarana dan prasarana di gampong yang kurang memada dan tergolong kurang bersih.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek : Mental (jiwa), Fisik (raga), Intelegensia (kecerdasan) dan Kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak

---

<sup>4</sup> H.A. Djazuli Fiqh *Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group 2003), h.10

ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem pembangunan desa.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Tinjauan dari fiqh siyasah kepada peran kepala desa Peunyeurat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu menjelaskan suatu kewajiban yang sangat penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri .Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kepala Desa Peunyeurat adalah Pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa Peunyeurat. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disiasikan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Kepala Desa Peunyeurat adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketata negaraan diindonesia perannya sebagai pemerintahan Desa Peunyeurat secara umum kurang optimal maka kepala Desa Peunyeurat dalam menjalankan tugasnya kurang memenuhi undang-undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa Peunyeurat.

## **KESIMPULAN**

Siyâsah Syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wakhid, Ali. 2011. Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi
- Abu bakar. 2015. Konsep Toleransi dan Bebas Beragama, Jurnal Toleransi: Media komunikasi umat beragama, Vol.7 No 2, Juli-Desember.
- Antarumat Beragama. Malang, UIN-Maliki Pres.
- Birokrasi Di Indonesia, Jurnal TaPis Vol. 7 No. 13, Juli-Desember.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Qs.Al-Hujurat (13) Fhatoni, Abdurahman. 2006. Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka cipta.
- Haidar, Nawawi. 1987. Metode Penelitian Bidang Sosial. Jogjakarta:Garma Pres. Hadi Sutrisno. 1985. Metodologi Research,(Jogjakarta:YPPAK Psikologi UGM
- Iqbal Hasan, M. 2002. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya .Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jhon Kelsay, Abdulaziz A. Sachedina, And David Litle. 1997. Kajian Lintas kultural Islam Barat :Kebebasan Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia. Yogyakarta.
- Kartini Kartono. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bndung: Mandar Maju.
- Masari Singaruban,Sopian Efendi. 2008. Metode Penelitian Survei, Jakarta:Pustaka LP3EX Indonesia.
- N. Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Madhi.

- University Press.
- Poerwadarmita, WJS. 1980. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rosana, Ellya. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TaPis Vol. 12 No.1 Januari-Juni 2016.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta
- Suharto Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.

**Sumber Jurnal**

- Surya Brata, Sumadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Syahrudin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusamedia
- Suryan A. Jamrah. Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam. Fakultas Ushuludin UIN Suska.
- Theodore, Lowi J, Four Systems of Policy, Politik, and Choise. (Chicago: Wiley America Society.
- Umi Sumbulah & Nurjanah. 2013. Pluralisme Agama Makna Da Lokalitas Pola Kerukunan
- Wahab. 2010. Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara.